

## **Pendidikan Toleransi Al-Ghazali Dalam Melawan Tindak Kekerasan Di Indonesia**

**Ita Wijayanti**

FAI Universitas Darussalam (UNIDA), Ponorogo  
email: [ita.wijayanti2611@gmail.com](mailto:ita.wijayanti2611@gmail.com)

**Zaenal Abidin**

Dosen FAI Undaris Ungaran  
email: [zenit.2611@gmail.com](mailto:zenit.2611@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tindak kekerasan bukanlah fenomena baru di Indonesia. Orde Baru memobilisasi preman dan geng pemuda untuk menyerang komunis dan kemudian mensponsori mereka masuk ke organisasi seperti Pemuda Pancasila. Setiap tahun, catatan tindak kekerasan menunjukkan kecenderungan untuk memecahkan rekor sebelumnya dengan impunitas. Badan-badan anti-tindak kekerasan belum berhasil mengidentifikasi motif pelakunya secara akurat. Lebih jauh lagi, budaya akhlaq dan konteks kelembagaan yang akan menjadikan tindak kekerasan sebagai sesuatu yang dibenci, dihindari, tidak menarik dan tidak menguntungkan belum dikembangkan. Budaya akhlaq seperti itu akan membantu dalam membina para pemimpin dan warga negara yang sensitif secara akhlaq dan berkomitmen untuk kemudian mengakui bahwa pemberantasan tindak kekerasan dalam segala bentuknya sebagai tugas mereka yang sah dan terhormat. Artikel ini membahas masalah tindak kekerasan di Indonesia menggunakan metode filosofis analisis reflektif, evaluasi dan penawaran. Penulis berpendapat bahwa pandangan Imam al-Ghazali tentang toleransi sangat kurang dimanfaatkan. Pandangan toleransi dengan referensi untuk memerangi tindak kekerasan, dipahami sebagai terdiri dari tiga elemen yaitu: intelektual (kesadaran), sosial (sensitivitas) dan spiritual (komitmen untuk bertindak). Makalah ini mengusulkan bagaimana pandangan toleransi al-Ghazali dapat dipromosikan dan kemungkinan menjawab tantangan yang harus dihadapi dalam proses di tingkat individu dan masyarakat menuju Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan budaya perdamaian.

Konsep Kunci: Tindak Kekerasan, Pendidikan, Toleransi

*Violence is not a new phenomenon in Indonesia. The New Order mobilized thugs and youth gangs to attack the communists and then sponsored their entry into organizations such as Pancasila Youth. Every year, records of acts of violence show a tendency to break previous records with impunity. Anti-violence agencies have not been able to accurately identify the motives of the perpetrators. Furthermore, a culture of morality and an institutional context that would make violence something to be despised, avoided, unattractive and unprofitable has not yet been developed. Such a culture of morality will help in cultivating leaders and citizens who are morally sensitive and committed to recognizing the eradication of violence in all its forms as their legitimate and honorable duty. This article discusses the problem of acts of violence in Indonesia using the philosophical method of reflective analysis, evaluation and offering. The author argues that Imam al-Ghazali's views on tolerance have been grossly underused. The view of tolerance with reference to combating acts of violence, is understood as consisting of three elements namely: intellectual (awareness), social (sensitivity) and spiritual (commitment to action). This paper proposes how al-Ghazali's view of tolerance can be promoted and possibly respond to challenges that must be faced in the process at the individual and community levels towards an Indonesia that is socially just for all Indonesian people with a culture of peace.*

Key Concepts: Violence, Education, Tolerance

## A. PENDAHULUAN

Tindak kekerasan mengacu pada sebuah perilaku yang menyebabkan kerusakan psikis, fisik atau barang orang lain. Ini melibatkan kewenangan pula, sehingga semua kewenangan yang tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Karenanya tindak kekerasan mencerminkan ketidakpekaan dan ketidakpedulian terhadap pelanggaran hak-hak orang lain. Pendidikan adalah proses yang memfasilitasi penalaran moral serta pengembangan kebajikan intelektual, sosial dan spiritual. Toleransi mengacu pada adanya pikiran, sikap, perilaku, tindakan untuk bersabar, menahan diri, menghargai, menghormati, tidak mengganggu atau melecehkan pihak lain, meskipun mereka berbeda faham, pandangan dan keyakinan agamanya (Tholkhah, 2010: 116-121).

Toleransi juga dapat bermakna menyerahkan segala persoalan terhadap hukum yang berlaku dan tidak main hakim sendiri. Toleransi dalam pandangan Imam al-Ghazali mencakup beberapa unsur yaitu intelektual, sosial dan Spiritual (komitmen untuk berbuat suatu kebaikan). Intelektual (kesadaran) mengacu pada suatu keadaan mendapat informasi secara moral, sehingga mendorong untuk tidak melakukan pembenaran diri sendiri dan acuh pada yang lainnya. Imam al-Gazālī, dalam *al-Mustasyfa*, menyebutnya dengan “kebenaran asumtif”. Bila ditarik dalam konteks pendidikan Islam, apabila seorang guru dan murid mampu menyadari kenisbian pemahaman Islam, maka mereka tidak akan mengklaim kebenaran sepihak dan tak mudah menyesatkan kelompok lain serta syarat dengan inklusifitas dan humanism (al-Ghazali, 1997: 394). Yang diharapkan kemudian adalah Kemampuan intelektual manusia sebagai alat untuk mengendalikan perilaku mendholimi hak-hak orang lain efek dari kemarahannya yang berujung tindak kekerasan. Sosial (sensitivitas) melibatkan respons emosional yang menyertai kesadaran. Respons emosional ini memotivasi pengejaran terhadap apa yang dianggap benar dan tidak menyukai apa yang dianggap salah. Imam Al-Ghazali, dalam *Ihya' Ulūmuddīn*, mengingatkan kita bahwa tindakan main hakim sendiri dengan menggunakan kekerasan, apalagi tawuran, adalah tindakan yang tidak dibenarkan meskipun

Ita Wijayanti & Zaenal Abidin

dengan dalih *amar ma'ruf nahi munkar* (al-Ghazali, 2008: 458). Spiritual (komitmen terhadap tindakan) mengacu pada respons praktis yang didorong oleh kesadaran dan sensitivitas. Al-Ghazali berpendapat bahwa komitmen bukan sekedar perbuatan, bukan pula sekedar kemampuan berbuat, juga bukan sekedar pengetahuan. Akan tetapi, harus menggabungkan dirinya dengan psikologi diri yang siap memunculkan perbuatan-perbuatan, dan situasi itu harus melekat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang muncul tidak bersifat sesaat melainkan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari (al-Ghazali, 2008: 458). Kesadaran memfasilitasi seseorang untuk membedakan antara niat, tindakan dan kebiasaan yang benar dan salah. Sensitivitas membuat seseorang merasa malu, bersalah atau menyesal karena menyadari bahwa niat, tindakan atau kebiasaannya berbahaya dan karenanya salah. Ini juga melibatkan keinginan dan kerinduan untuk memperbaiki keadaan. Komitmen untuk bertindak membuat seseorang mencari pengampunan dari orang yang telah dia bersalah dan melakukan hal lain yang diperlukan untuk memulihkan hubungan baik dengan pihak yang dirugikan.

Pandangan toleransi al-Ghazali diharapkan menumbuhkan kesadaran, kepekaan, dan komitmen untuk bertindak. Sekaligus mencontohkan keunggulan akhlaq dalam pemikiran, perkataan, tindakan, dan karakter. Tulisan ini berpendapat bahwa tindak kekerasan dapat diperangi dengan lebih efektif melalui pendidikan nilai toleransi al-Ghazali.

Tindak kekerasan bukanlah fenomena baru di Indonesia. Apa yang baru adalah bentuk-bentuk yang terus bermutasi yang diambilnya dan bahaya yang merusaknya untuk kemakmuran, keamanan, reputasi, dan kesejahteraan integral dan kelangsungan hidup bangsa kita. Terlepas dari Indonesia telah mendirikan dan mengalokasikan sumber daya untuk memerangi tindak kekerasan, tindak kekerasan semakin memburuk dan semakin meluas di Indonesia. Sepanjang bulan Maret 2015 data SNPK mencatat 2.027 insiden dari seluruh jenis kekerasan dengan dampak 216 korban tewas dan 1.690 cedera serta 91 bangunan rusak, kriminalitas menempati urutan teratas baik dalam jumlah insiden maupun korban tewas, yakni 1.103 insiden dan 123 tewas. Dalam kategori konflik kekerasan, SNPK mencatat 547 insiden yang menewaskan 35

orang, mencederai 619 orang, dan mengakibatkan 58 bangunan rusak. Konflik main hakim menyumbang jumlah insiden dan dampak tertinggi (SNPK, 2015).

Merespons berbagai aksi teror tersebut, hingga pertengahan 2014 setidaknya pemerintah telah menahan kurang lebih 900 orang teroris dan sekitar 90 lebih terduga teroris tewas. Data yang disampaikan BNPT, sejak tahun 2000 hingga 2014, sebanyak 729 teroris telah mendapatkan vonis dari pengadilan, 19 dalam proses persidangan, 22 dalam proses penyidikan, 330 masih dipenjara, 561 telah keluar dari penjara dan 96 orang tewas (ditembak mati maupun karena bom bunuh diri) (FGD, 2014). CSIS menyatakan bahwa Indonesia menghadapi situasi yang tidak mudah dalam mengurangi tindakan kekerasan ekstrem (counter violent extremism) berbasis agama dan perilaku intoleran terhadap kelompok minoritas. Salah satu faktor penting yang memengaruhi penurunan rating demokrasi Indonesia pada skala global adalah tingginya angka diskriminasi pada kelompok yang berbeda dan minoritas (CSIS, 2019). Sehingga tindak kekerasan dapat dikategorikan sebagai bencana nasional yang tidak diumumkan yang harus ditangani sebagai keadaan darurat yang membutuhkan upaya kolektif yang tulus dan berkesinambungan untuk menyelesaikannya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **a. Tantangan Utama dalam perang melawan tindak kekerasan di Indonesia**

Strategi yang efektif untuk memerangi Tindak Kekerasan memiliki dua dimensi utama: preventif dan reaktif. Dimensi pencegahan melibatkan kesadaran anti-tindak kekerasan, identifikasi dan penyegelan celah tindak kekerasan. Semua langkah ini bertujuan membuat tindak kekerasan menjadi tidak diinginkan dan tidak menguntungkan. Sekaligus juga berusaha membuat integritas dan perilaku yang menarik dan bermanfaat. Penanganan preventif memiliki keutamaan dapat menurunkan risiko individu menjadi pelaku maupun korban (Ballerina, 2019: 18-31). Dimensi reaktif mengatasi tindak kekerasan ketika itu terjadi. Tindakan reaktif adalah usaha memperbaiki opini publik, khususnya yang dilandasi oleh tindakan nyata (Natawilaga, 2018: 69-70). Ini melibatkan pengaturan

mekanisme, proses dan lembaga yang memfasilitasi deteksi, investigasi dan penuntutan tindak kekerasan yang berhasil; hukuman bagi orang yang bertindak anarkhi, pemulihan sumber daya yang dirusak dan bekerja sama dengan pihak lain dalam kegiatan anti-tindak kekerasan. Sementara beberapa tindak kekerasan telah terdeteksi dan dilaporkan, terbukti bahwa dengan sifat sistemik tindak kekerasan di Indonesia, ada lebih banyak anarkhisme yang mungkin belum ditemukan atau dilaporkan. Selain itu sebagian besar anarkhisme yang telah dilaporkan belum diselidiki dan diselesaikan secara sukses dan meyakinkan. Investigasi tindak kekerasan, terutama yang melibatkan masa dalam jumlah besar jarang menghasilkan penuntutan yang sukses dan hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan. Tampaknya ada sedikit bukti bahwa kolaborasi dan jaringan dengan agen-agen anti-tindak kekerasan lainnya telah menghasilkan terobosan nyata dalam hal penuntutan yang berhasil.

Pengadilan dan Mahkamah Agung Indonesia mengakui bahwa jaringan tindak kekerasan di Indonesia telah menembus bahkan lembaga pengawasan yang diciptakan untuk memerangi tindak kekerasan, misalnya adalah tindakan aparat hukum (kepolisian) yang menyiksa seseorang demi mendapat pengakuan bahwa ia terlibat dalam sebuah organisasi terlarang, namun mereka tidak akan terjerat oleh Pasal 351 KUHP, walaupun unsur-unsur penganiayaan telah dipenuhi. kasus Bank Mandiri tidak diperiksa dengan benar, mantan penguasa orde baru tidak terjamah oleh hukum, ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tidak terjerat hukum pidana, mantan Kapolda lepas dari jeratan hukum. Rupanya cukup sulit menangkap penguasa yang melakukan kejahatan (Rakhmat, 2019: 9). Ini berarti bahwa tindak kekerasan telah menjalar ke semua organ pemerintahan sehingga memerangi tindak kekerasan menjadi rumit dan menghancurkan diri sendiri. Lembaga-lembaga yang dipercayakan untuk mendorong dimensi pencegahan dan reaktif dalam memberantas tindak kekerasan itu sendiri terlibat dan dengan demikian tidak memiliki wewenang, komitmen, dan kemauan untuk melaksanakan mandat secara

efektif. Ini menunjukkan kegagalan intelektual, sosial dan spiritual.

Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sepanjang 2011, kekerasan sosial terjadi di Indonesia, berdasarkan intensitas dan eskalasi: ada kurang lebih 10 kasus terjadi antara April dan Juli 2011 dan September - Desember 2011. Kekerasan ini umumnya berkaitan dengan konflik pengelolaan sumber daya alam, suksesi politik lokal, hingga gesekan sosial kehidupan sehari-hari masyarakat. Pola kekerasan melibatkan komunitas masyarakat, polisi, dan komunitas perusahaan bisnis di lokasi acara (Rudianto, 2012; [www.kontras.org](http://www.kontras.org)). Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal, informal dan non-formal Indonesia gagal menumbuhkan nilai-nilai, sikap, dan kebiasaan anti-tindak kekerasan. Ini terbukti dalam investigasi dan penuntutan tindak kekerasan. Orang-orang yang dituduh selalu menyatakan tidak bersalah. Ada klaim dan klaim balik tuduhan palsu yang semuanya diarahkan untuk menyelamatkan diri dengan cara apa pun. Petugas yang terlibat tindak kekerasan harus dipaksa mundur. Tidak pernah terdengar permintaan maaf kepada warga Indonesia, pengambilan tanggung jawab, rasa penyesalan. Dalam beberapa kasus, mereka yang dituduh melakukan tindak kekerasan tampaknya menjadi selebritas yang dipuja dan ditiru. Jika mereka bersaing untuk posisi politik, mereka dengan mudah mendapatkan simpati. Semua ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap kewajiban dan prinsip moral. Ketidakpekaan ini kemudian menjurus pada semakin jauhnya para pemimpin dari norma-norma etika, semakin menipisnya etika di kalangan pemimpin mengakibatkan semakin sulitnya para rakyat untuk mendapatkan hak-haknya (Mashudi, 2017: 57). Mereka mencontohkan sifat buruk seperti arogansi, impunitas, ketidakdisiplinan dan ketidakadilan. Budaya ini merusak perjuangan melawan tindak kekerasan.

Jika seseorang berpikir bahwa perang anti-tindak kekerasan akan dimenangkan oleh pemuda Indonesia yang berpendidikan. Para pemuda yang berpendidikan juga telah belajar dan mewujudkan keterpusatan pada

diri sendiri dan kelompoknya, fanatisme, pengecut moral, keengganan untuk menghormati perbedaan, mengabaikan hukum dan apatis moral. Kondisi ini mencerminkan status moral masyarakat pada umumnya. Meskipun benar bahwa tidak semua warga Indonesia bertindak anarkhis dan ada upaya anti-tindak kekerasan asli oleh pemerintah dan yang lainnya, jelas ada kebutuhan untuk pemahaman toleransi yang lebih bersemangat dalam perang melawan Tindak Kekerasan. Pandangan toleransi sebagaimana dipahami dalam makalah ini adalah kualitas yang setiap orang Indonesia dapat kembangkan. Itu tidak selalu merupakan sifat bagi orang-orang di posisi tanggung jawab. Ini adalah pencarian integritas, kesadaran, dan tindakan yang teliti dan konsisten, yang berbeda dan tidak salah lagi. Karena itu memberikan arahan dan wawasan moral. Ketika orang-orang dalam posisi yang dipercaya memberikan pemahaman toleransi yang baik, mereka naik banding ke sumber daya moral pada orang lain sehingga menginspirasi integritas moral. Seseorang yang berintegritas moral adalah seseorang yang tanpa topeng, yang bertindak sesuai dengan ucapan, ketika di depan dan di belakang publik tidak berbeda, konsisten antara apa yang diyakini dan yang dilakukan, antara sikap dan tindakan, antara nilai hidup yang dijalani, tanpa kompromi, matang dan berfokus untuk mencapai tujuan (Wahyudin, 2017: 17-36). Pendidikan toleransi melibatkan keberanian untuk membela apa yang benar meskipun ditentang, diejek, dan diintimidasi. Budaya moral semacam itu akan membantu kita mengembangkan para pemimpin dan warga negara yang peka secara akhlaq dan berkomitmen yang akan mengakui pemberantasan tindak kekerasan dalam segala bentuknya sebagai tugas mereka dan terhormat.

**b. Memerangi Tindak Kekerasan Merupakan Lahan Pendidikan Toleransi al-Ghazali**

Seperti yang ditunjukkan dalam bagian sebelumnya, tindak kekerasan di Indonesia antara lain mencerminkan risiko moral dan kekurangannya. Misalnya, tindak kekerasan didorong oleh keserakahan yang tak pernah

puas membuat Indonesia berisiko kehilangan sumber daya publik dalam jumlah besar sehingga menyangkal Indonesia sangat pantas mendapatkan layanan berkualitas. Hal ini menyebabkan erosi kepercayaan publik yang selanjutnya melemahkan institusi dan proses demokrasi. Untuk mengatasi risiko moral dan kekurangan yang sebagian memunculkan dan juga melanggengkan tindak kekerasan, penulis menganggap pendidikan toleransi al-Ghazali layak untuk menjadi solusi.

Pendidikan toleransi mengacu pada proses formal, informal dan non-formal yang menumbuhkan penalaran akhlaq dan pembentukan kebajikan. Ini adalah proses seumur hidup yang difasilitasi oleh beragam agen dan konteks. Sekolah, misalnya, adalah konteks formal di mana pendidikan moral dapat ditingkatkan. Dalam konteks formal, peluang belajar-mengajar direncanakan dan dilaksanakan dengan sengaja dan sistematis. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Subandijah bahwa pengembangan kurikulum merupakan kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru, melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan dalam periode tertentu (Subandijah, 1992: 38). Kelompok sebaya dan pertemanan adalah konteks informal di mana pendidikan moral juga dapat terjadi, karena teman sebaya memegang peran penting sebagai kebutuhan untuk dapat diterima dan dipandang sebagai anggota suatu kelompok (Rohman dan Mugiarto; 2016: 13). Konteks informal untuk pembelajaran tidak direncanakan secara sistematis atau sengaja. Sebaliknya, pembelajaran terjadi melalui asosiasi, interaksi, dan imitasi. Konteks non-formal seperti perjalanan dan kunjungan adalah kegiatan terorganisir di luar program formal di mana kegiatan pembelajaran disusun dan dievaluasi secara sistematis. Kegiatan-kegiatan ini mungkin memiliki tujuan pembelajaran yang ditempuh dengan cara yang kurang formal, namun kegiatan pembelajaran informal dan non-formal mungkin berperan dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan minat (G. Tisza et al, 2019: 122). Konteks pembelajaran yang dijelaskan di atas

menyediakan konteks untuk interaksi sosial, penalaran moral dan pembentukan karakter.

Penalaran moral melibatkan refleksi tentang kebenaran atau kesalahan niat dan tindakan manusia. Evaluasi perilaku manusia ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang dianggap dapat diterima untuk membimbing dan menilai perilaku. Penalaran moral mengandaikan kesadaran moral dasar. Kita harus sadar tentang sifat sosial dan rasional manusia. Sebagai makhluk yang rasional dan sosial, manusia memiliki tujuan dan kepentingan yang dapat dipromosikan dan dirusak oleh orang lain. Prinsip benar dan salah menentukan bagaimana niat, tindakan, dan kebiasaan dari jenis tertentu merusak atau meningkatkan kesejahteraan manusia. Prinsip-prinsip ini tidak dapat diterapkan secara mekanis ke dalam situasi manusia yang kompleks. Sedang Islam mengingatkan umatnya bahwa amal dari tindakan seseorang bergantung pada niatnya. Dalil ini menunjukkan bahwa Islam melihat kebenaran atau kesalahan moral pada motif atau niat orang yang melakukan tindakan (Pawenang, 2009: 58).

Pendidikan toleransi memperlengkapi peserta didik dengan informasi moral dan keterampilan penalaran moral yang memungkinkan mereka untuk menginterogasi situasi dan masalah moral dan menavigasi jalan keluar dari mereka dengan cara yang mempertimbangkan martabat manusia serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Ini membuat pendidikan moral diperlukan untuk kewarganegaraan yang bertanggung jawab sebagaimana Lickona (1992) memandang karakter atau watak memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni moral knowing, moral feeling, and moral behavioral atau konsep moral, rasa dan sikap moral dan perilaku moral. Pengejaran berulang-ulang terhadap tindakan yang benar dan menghindari tindakan yang salah mengarah pada pembentukan kebiasaan dan pola perilaku yang teliti yang pada akhirnya menjadi sifat karakter yang stabil yang diwujudkan sebagai keadaan individu. Orang seperti itu menerapkan sudut pandang toleransi bersama dengan sudut pandang lain sambil membuat keputusan tentang apa yang harus dipercaya

dan dilakukan. Penggunaan konsisten dari sudut pandang akhlaq ini, yang merupakan hasil yang diinginkan dari pendidikan toleransi, adalah apa yang makalah ini definisikan sebagai spiritual. Ini melibatkan bimbingan secara konsisten oleh sudut pandang moral. Ini diperkuat oleh pendidikan moral yang merupakan proses seumur hidup.

Kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan ini, sudah selayaknya pembangunan karakter bangsa menjadi arus utama dalam pembangunan nasional. Artinya, setiap upaya pembangunan harus selalu dipikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter (Setiawan, 2015: 62). Dinyatakan oleh Zheng, D. (2015) bahwa pemimpin perlu pada tahap moral yang tinggi, disebabkan mereka berhubungan langsung dengan sumber manusia. Dengan kata lain, pemimpin bukan sekedar berhubungan langsung dengan kemampuan apabila melaksanakan tanggung jawab mereka akan tetapi juga memenuhi keperluan, aspirasi dan nilai pengikutnya. Gaya kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan moral. Kepemimpinan moral muncul dari usaha pemimpin mengenal pasti keperluan dan kehendak, aspirasi dan nilai pengikutnya ([Greenfield, W.](#) 2004; Shapiro & Stefkovich, 2010: 174-196). Usaha tersebut menyebabkan pengikut mengubah karakter dan tingkah laku serta bersama-sama dengan pemimpin mencapai tujuan bersama. Pemimpin semacam itu memberikan pengaruh dan contoh moral dalam masyarakat. Mereka menunjukkan kemampuan intelektual, emosional, dan interpersonal seperti kejujuran, kewajaran, komitmen, integritas, kerendahan hati, dan keberanian. Para pemimpin yang toleran, sebagai contoh, mengomunikasikan apa yang mereka hargai dan memotivasi orang lain untuk mengadopsi sudut pandang toleransi. Ketika para pemimpin yang toleran mengambil posisi otoritas pengaruh mereka telah ditemukan berdampak pada organisasi dan anggota mereka secara positif. Menurut Edison bahwa kepemimpinan berpengaruh positif adalah pemimpin yang merangsang dan menginspirasi (mentransformasi) pengikutnya untuk hasil yang luar biasa. Menurutnya karakteristik dari pemimpin berpengaruh

positif adalah pemimpin yang menghargai setiap perbedaan pendapat untuk tujuan ke arah yang lebih baik dan mengajak seluruh anggotanya untuk menghormati perbedaan dan keyakinan (Edison, 2016: 97). Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dengan toleran memiliki pengaruh positif pada perilaku manusia.

Pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran dapat memberikan kontribusi positif dalam memerangi tindak kekerasan dengan meningkatkan kegiatan anti-tindak kekerasan yang preventif dan reaktif. Dengan mempromosikan kesadaran toleransi, pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran membuat orang menghargai makna, bentuk-bentuk alami, dan konsekuensi dari tindak kekerasan. Orang-orang mendapat informasi tentang implikasi tindak kekerasan pada hubungan dan kesejahteraan manusia. Mereka juga mengetahui tentang efek tindak kekerasan dan dampak buruknya bagi generasi mendatang. Kesadaran toleransi juga membuat orang mengidentifikasi pengaruh yang mendorong tindak kekerasan di masyarakat. Kesadaran ini memfasilitasi dialog tentang tindak kekerasan yang berguna dalam mempromosikan penalaran akhlaq. Dialog moral tentang tindak kekerasan memberikan peluang bagi orang untuk terlibat dalam argumen yang mendukung atau menentang tindak kekerasan dan mengambil posisi pribadi yang beralasan. Dialog merupakan strategi yang cukup efektif untuk melabuhkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran toleransi. Toleransi tidak mungkin tertanam secara baik tanpa dialog yang intensif. Dialog yang serba dialektik merupakan strategi yang penting ditempuh agar toleransi bukan sekadar sebagai wacana, tetapi menjadi praktik dalam kehidupan sehari-hari (Naim, 2016: 438).

Kesadaran ini memfasilitasi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sekalipun masih mungkin bagi orang untuk membuat pilihan yang salah seperti yang mereka lakukan, mereka berada dalam posisi (sering kali dengan usaha keras) untuk mencari tahu bahwa mereka salah dan mengapa demikian. Kesadaran saja tidak efektif kecuali jika

disertai dengan sensitivitas yang tepat. Sensitivitas toleransi bersifat motivasional dan cenderung untuk merespons kesadaran yang diperoleh. Sensitivitas ini dipupuk dengan secara imajinatif menempatkan diri pada posisi orang lain dan dengan demikian secara empatik berbagi perasaan dan pengalaman mereka. Tanpa kepekaan empatik ini, manusia tidak peduli dengan penderitaan atau kebahagiaan sesama makhluk hidup dan karenanya tidak merasa berkewajiban untuk meringankan atau meningkatkannya masing-masing. Menurut Bickmore; Fernando; Ring & Schulman (2009), empati merupakan elemen kunci untuk membangun sebagian besar jenis hubungan sosial yang berarti antar orang. Serta empati dapat dipraktikkan dan dibudidayakan menurut Gerdes & Segal (2009). Sensitivitas ini mendorong seseorang untuk bertindak. Komitmen untuk bertindak ini adalah cara konkret dan eksplisit dari aktualisasi transformasi akhlaq. Sehubungan dengan tindak kekerasan, mengetahui bahwa menghina atau merendahkan orang lain itu salah adalah kesadaran toleransi. Merasa direndahkan dan dihinakan sebagai seseorang ketika bertindak anarkhis adalah ungkapan kepekaan akhlaq. Menolak untuk bertindak anarkhis dan melaporkan kejadian anarkhis kepada pihak berwenang adalah tindakan akhlaq yang efektif yang secara eksplisit menunjukkan pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran.

**c. Promosi pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran**

Keberhasilan anti-tindak kekerasan perlu dibahas, dan dipublikasikan sehingga pemberantasan tindak kekerasan dapat didukung dan digambarkan secara menarik. Ini adalah cara informal dan non-formal untuk membentuk sikap anti-tindak kekerasan. Pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran menumbuhkan nilai-nilai seperti penghormatan dan penghargaan. Salah satu upaya ke arah penciptaan kondisi ,damai (*being peaceful*) dan aman (*being secure*) dapat dibangun melalui penguatan toleransi (Fuad, 2015: 255). Pemimpin yang toleran itu menghormati dan menghargai. Mereka beroperasi di atas papan dan bersedia untuk menjawab keputusan dan tindakan mereka. Tindak

kekerasan tumbuh subur di mana proses dan mekanisme pengawasan tidak efektif sehingga melindungi keputusan dan tindakan dari pengawasan. Kritik dianggap menyinggung dan mengganggu dan karenanya tidak dituntut atau dihukum. Karena itu, pemikiran kritis perlu ditingkatkan untuk memungkinkan orang mempertanyakan dan memanggil orang lain untuk menjelaskan apa yang dikatakan dan dilakukan. Duron, *et. al.* (2006: 160-166), menyatakan bahwa pemikir kritis mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi, memunculkan pertanyaan dan masalah yang vital, menyusun pertanyaan dan masalah tersebut dengan jelas, mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan menggunakan ide-ide abstrak, berpikiran terbuka, serta mengomunikasikannya dengan efektif. Rendahnya kemampuan berpikir kritis dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis perlu dilatihkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Yuliati (2013: 55-57) yang menyatakan bahwa berpikir kritis dapat diajarkan dan memerlukan latihan untuk dapat memilikinya.

Individualitas, yang merupakan kemandirian pemikiran dan tindakan harus dipupuk di antara warga Indonesia melalui pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran. Kepemimpinan yang toleran adalah hati nurani dan prinsip hidup. Mereka berusaha pada apa yang mereka yakini meskipun mereka menghadapi perlawanan keras. Pandangan toleransi memberi seseorang fokus yang membedakan seseorang dari mereka yang tidak melakukannya. Keberanian untuk berdiri sendiri memiliki dasar ketika moralitas menuntutnya adalah kebajikan anti-tindak kekerasan yang kuat. Individualitas, yang dibimbing oleh kompetensi moral perlu didukung dan dihargai dalam masyarakat yang ingin memerangi tindak kekerasan. Karena erosi gradual individualitas muncul bersamaan dengan terbitnya kapitalisme dan rasionalitas (Zuldafrial, 2013: 241). Sehingga perlu ada penekanan pada pengembangan kebiasaan toleransi dan karakter dalam pendidikan daripada sekadar perolehan pengetahuan dan keterampilan. Tanpa penalaran toleransi dan pengembangan nilai-nilai

toleransi, pengembangan intelektual saja akan merusak. Hal ini terbukti di dunia saat ini di mana teroris yang memiliki informasi dan terampil membunuh warga yang tidak bersalah dengan berpura-pura menyelesaikan masalah yang tidak ada hubungannya dengan warga yang dibunuh. Kecerdasan dan keterampilan yang tidak tahan dengan rasa keadilan yang adil dan kepedulian terhadap martabat manusia pada akhirnya merusak dan berbahaya.

#### **d. Beberapa Kemungkinan Tantangan**

Salah satu tantangan utama yang dihadapi upaya untuk mempromosikan pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran adalah impunitas. Secara sederhana impunitas dapat dipahami sebagai tindakan atau kondisi sistemik yang mengarah pada pembiaran atau pelepasan bebas para pelaku kejahatan dari tanggung jawabnya secara hukum (Halili, 2016: 199-208). Ada banyak contoh yang tampaknya menunjukkan bahwa tindak kekerasan dibiarkan, bahkan dipuja di masyarakat kita. Orang-orang memiliki banyak kasus untuk menunjukkan kesepakatan tindak kekerasan yang tidak pernah dituntut dengan sukses dan banyak orang yang dituduh melakukan tindak kekerasan yang berkuasa dan bebas meskipun sering dituduh. Banyak bukti juga bahwa tindak kekerasan telah merambah semua sektor. Jika anggota peradilan, polisi, parlemen, sektor swasta, ulama dan profesi lainnya semakin banyak ditemukan bertindak anarkhis, yang sebenarnya merupakan kasus di Indonesia, tindak kekerasan semakin menjadi cara hidup yang mengakar yang sulit untuk diberantas. Yang dibutuhkan adalah contoh atau model integritas di tengah-tengah tindak-tindak kekerasan yang akan memberikan narasi alternatif.

Tindak kekerasan sistemik membuat cara moral dan hukum dalam melakukan sesuatu tampak lambat, tidak menguntungkan, dan tidak efektif. Jalan pintas ilegal dan tidak bermoral tampak bijaksana, lebih cepat dan lebih mudah. Kekerasan sistemik menjadi salah satu hal yang tidak terlihat secara kasat mata, karena disertai dengan tindakan *irrational*.

Tindakan *irrational* dianalogikan oleh Zizek (2008: 2) dalam beberapa slogan produk kapitalis, yang justru memanfaatkan krisis kemanusiaan masyarakat dewasa ini. Namun melihat dalam jangka panjang dan mempertimbangkan kesejahteraan semua yang terlibat, tindak kekerasan adalah pilihan yang kurang efektif untuk mencapai tujuan. Di negara di mana ketimpangan melebar dan pengangguran serta kemiskinan meluas, tindak kekerasan menggoda bagi mereka yang telah berjuang keras dan lama untuk keluar dari perangkap penindasan dan kemiskinan dengan sia-sia. Dengan kata lain kekerasan sistemik adalah bagian yang tidak terlihat, bagian gelap dari pengawasan peradaban umat manusia. Kesulitan terbesarnya kekerasan sistemik tidak mampu diidentifikasi secara imajiner atau dibahasakan dengan proses simbolik. Mereka yang telah memperoleh kekuasaannya secara anarkhis juga mungkin merasa sulit untuk kembali ke cara moral dan hukum kehidupan karena hal ini dapat memberikan kesempatan untuk evaluasi dan hukuman atas perilaku mereka di masa lalu. Linden (2012) menjabarkan bahwa ternyata kekerasan dalam bentuk kekerasan sistemik lebih menekankan dimensi *non-violence* yang justru dianggap kekerasan yang paling ultim dibandingkan tindakan kekerasan yang kasat mata.

**e. Kemungkinan Pemulihan dan Peluang**

Reformasi pendidikan adalah salah satu obat untuk tindak kekerasan di Indonesia. Reformasi Pendidikan merupakan salah satu bentuk terwujudnya *human capital* harus didesain sedemikian rupa sekiranya mampu mencetak sumber daya manusia yang tetap kukuh keimanan dan ketakwaannya, siap berlaga dan sukses di era globalisasi (Dacholfany, 2015: 173-194). Reformasi ini perlu mempertimbangkan konteks pembelajaran formal, informal dan non-formal. Ini juga perlu melibatkan berbagai agen yang mempengaruhi hasil pembelajaran dalam berbagai konteks. Reformasi pendidikan di Indonesia perlu fokus pada pembentukan atribut moral dan kebajikan yang memfasilitasi penalaran toleransi dan kepemimpinan yang toleran. Agama memiliki beberapa

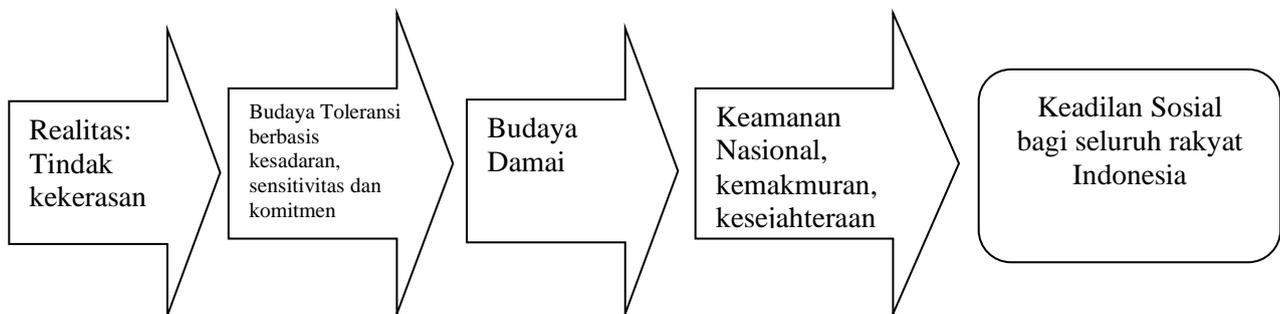
sumber daya akhlaq yang dapat digunakan secara inovatif untuk mempromosikan pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran. Pandangan toleransi al-Ghazali, memiliki beberapa pendekatan akhlaq yang menurut penulis potensial untuk mengembangkan pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran. Pendekatan tersebut melibatkan proses menciptakan alasan akhlaq untuk kepentingan bersama daripada melakukannya untuk pujian, kesenangan atau kekuasaan. Hal itu dilakukannya karena hal itu adalah benar. Pendekatan ini melibatkan proses melampaui persyaratan dan harapan normal dan mengharapkan atau tidak menuntut insentif eksternal. Pemenuhan usaha melakukan suatu hal yang benar, melayani umat manusia atau mengurangi penderitaan menjadi imbalan internal (kepuasan hati). Pendekatan ini bermanfaat karena beberapa situasi akhlaq adalah unik dan tidak memiliki preseden atau aturan sebagai panduan untuk bertindak. Dalam beberapa situasi, harapan rata-rata manusia atau bahkan aturan dapat memanfaatkan kelemahan akhlaq atau kompromi yang merugikan kesejahteraan manusia. Situasi seperti itu membutuhkan keberanian akhlaq untuk melampaui norma dan menunjukkan keunggulan toleransi dan kepemimpinan yang toleran.

Pendekatan penghakiman terakhir terhadap kehidupan berakhlaq melibatkan keyakinan bahwa kesejahteraan manusia adalah tujuan sakral, yang mana individu, komunitas, dan bangsa wajib secara ilahi untuk mengejanya dan untuk itulah mereka pada akhirnya akan dipanggil untuk dipertanggungjawabkan oleh Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Karena itu manusia dapat saja mengabaikan kewajiban akhlaq mereka dan bahkan luput dari tanggung jawab dunia tetapi ini tidak akan terjadi pada Tuhan. Karena itu impunitas tak berarti dalam pendekatan penghakiman terakhir. Pendekatan ini meningkatkan akhlaq dan mendorong manusia untuk meningkatkan aspirasi mereka juga. Pendekatan ini juga optimis dan inklusif karena memandang bahkan kekuatan duniawi sebagai subjek standar akhlaq. Pendekatan ini menguatkan para pemimpin untuk bertahan terhadap penganiayaan dan penindasan yang menemui mereka

dan untuk tetap berdiri teguh demi apa yang benar.

Pendekatan akhlaq Indonesia yang asli adalah sumber daya kebesaran jiwa untuk membina pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran. Pendekatan ini menekankan kepedulian dan berbagi serta mengejar kebaikan bersama. Penduduk Indonesia menghargai keterkaitan manusia. Mereka menganggap penderitaan seseorang sebagai yang pada akhirnya mampu mengarah pada penderitaan semua orang dan oleh karena itu kelemahan dan kesalahan individu tidak diabaikan. Ada rasa saling memiliki yang mendalam disertai dengan tanggung jawab bersama. Pendekatan komunitas ini untuk mengejar kesejahteraan manusia dapat secara inovatif diarahkan untuk memerangi tindak kekerasan jika dipupuk di masyarakat kita saat ini.

Akhirnya, karena tindak kekerasan endemik sistemik menyiratkan banyak contoh di mana orang-orang telah mengkhianati persatuan dan kesatuan publik dengan merugikan kesejahteraan orang lain, pendekatan kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi adalah cara-cara yang telah mengukir dan mencatat sejarah masa lalu bangsa ini yang intoleran, menghadapi bahaya hasil apa yang telah dihancurkannya dan hadir untuk itu juga demi untuk memulihkan hubungan sesama. Ini jika dilakukan dengan baik dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan dan memunculkan awal akhlaq mulia yang baru hingga tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tergambar pada flowchart pemulihan dan peluang pendidikan toleransi, lihat gambar 1.1.



**gambar 1.1.** flowchart dari siklus pemulihan dan peluang pendidikan toleransi di Indonesia

### C. Kesimpulan

Tindak kekerasan endemik sistemik telah ditemukan sebagai masalah serius di Indonesia. Itu mengancam kemakmuran, integritas, dan kelangsungan hidup negara. Lembaga (anti terorisme dan radikalisme) untuk memerangi tindak kekerasan telah dibentuk dan sumber daya dialokasikan untuk memerangi tindak kekerasan tetapi temuan penelitian-penelitian menunjukkan bahwa tindak kekerasan terus meningkat membuat warga Indonesia pesimis dan apatis. Sumber daya yang sangat besar telah diarahkan untuk memerangi tindak kekerasan tanpa banyak keberhasilan. Namun, makalah ini berpendapat bahwa pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran dapat melengkapi strategi anti-tindak kekerasan yang ada dengan memupuk sikap dan kebijakan yang memberdayakan umat untuk menginterogasi dan menghadapi tindak kekerasan. Selain itu, pendidikan toleransi dan kepemimpinan yang toleran dapat memodelkan integritas sebagai opsi anti-tindak kekerasan yang menarik dan kuat.

### Daftar Pustaka

- Ballerina, Titisa; Immanuel, Aria Saloka. 2019. Gambaran Tindakan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmu Perilaku*, [S.l.], vol. 3, no. 1, hlm. 18-31, aug. doi: <https://doi.org/10.25077/jip.3.1.18-31.2019>. Available at: <http://jip.fk.unand.ac.id/index.php/jip/article/view/93>.
- Dacholfany, M. 2015. Reformasi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 173-194. Retrieved from <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/441>
- Duron, R., Limbach, B., & Waugh., W. 2006. Critical Thinking Framework for Any Discipline. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 17(2), 160—166. Retrieved from <http://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE55.pdf>
- Fuad, Nurhattati. 2015. Penanaman Toleransi Beragama Pada Anak Melalui Pendidikan, *JOURNAL SOCIETAS DEI*, Vol. 2, No. 1, April, hlm.255. DOI: [10.33550/sd.v2i1.61](https://doi.org/10.33550/sd.v2i1.61) Retrieved from <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1081217>
- Gerdes, K. E., & Segal, E. A. 2009. A Social Work Model of Empathy. *Journal Advances in Social Work*.10. (2), hlm.122. DOI: <https://doi.org/10.18060/235> Retrieved from <http://journals.iupui.edu/index.php/advancesinsocialwork/article/view/235/215>
- Greenfield, W. 2004, Moral leadership in schools, *Journal of Educational Administration*, Vol. 42 No. 2, hlm. 174-196. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/09578230410525595>
- Halili, H. 2016. Politik Penegakan Hak Asasi Manusia Pada Masa Transisi Di Indonesia, *Jurnal Civics: Media Kajian Keangnegeraan*. Volume 13 Nomor 2, Desember, hlm.199-208. DOI: <https://doi.org/10.213831/civics.v13i2.12744> Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/12744>
- Mashudi. 2017 Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI, No. 2, Desember . hlm. 57. DOI: 10.5281/zenodo.1468366. Retrieved from <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/543>

- Naim, Ngainun. 2016 Abdurrahman Wahid: Universalisme Islam dan Toleransi, *Jurnal KALAM*, Volume 10, No. 2, Desember, hlm. 438.  
<https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.8> Retrieved from  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/8/8>
- Natawilaga. Susilawati. 2018. Peran Etika Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Public Relations, *Jurnal WACANA*, Volume 17. No. 1, Juni, hlm. 69-70. DOI: <https://doi.org/10.32509/wacana.v17i1.492>. Retrieved from <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/492>
- Pawenang, Supawi. 2009. Islam dan Manajemen Kebenaran, *Jurnal SUHUF*, Vol. 21, No. 1, Mei, hlm. 58 Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2237/3.%20Supawani%20Pawenang.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rakhmat, Dr. H. Muhammad, SH., M.H. 2019. Akselerasi Antara Kejahatan Berdimensi Simulakra Dengan Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Al-Akhbar*, Universitas Majalengka, hlm. 9. Retrieved from <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/AA/article/view/1441/1313>
- Rohman, Y., & Mugiarto, H. 2016. Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Kemampuan Menjalani Relasi Pertemanan. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 5(1). hlm. 13. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk/article/view/12428>
- Rudianto, Yayan. 2012. Fenomena Kekerasan Sosial dan Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia, *Jurnal AKP*, Vol. 1, No. 1, Februari, hlm. 67. DOI: <https://doi.org/10.33558/akp.v1i1.574>. Retrieved from <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/574/466>
- Setiawan, Deni. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, vol.6, no.2, Universitas Negeri Medan, Indonesia, hlm. 62. DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v6i2.2285.g1958>. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/article/view/2285/1958>
- Tisza, G. et al. 2019. The role of age and gender on implementing informal and non-formal science learning activities for children. *In Proceedings of ACM Fablearn Europe conference FABLEARN EUROPE'19, May, Oulu, Finland*, hlm. 2. Doi:[10.1145/3335055.3335065](https://doi.org/10.1145/3335055.3335065)
- van der Linden, H. 2012. On the Violence of Systemic Violence: A Critique of Slavoj Žižek. *Radical Philosophy Review*, 15 (1), hlm. 21. doi: [10.5840/radphilrev20121516](https://doi.org/10.5840/radphilrev20121516). Available from: [http://digitalcommons.butler.edu/facsch\\_papers/248/](http://digitalcommons.butler.edu/facsch_papers/248/).
- Wahyudin, Ade Herlan. 2017. Integritas Moral Pemimpin: Antara Cita Dan

Ita Wijayanti & Zaenal Abidin

Fakta. *Jurnal An-Nidhom*, vol. 1, no. 01, hlm. 17-36, januari. ISSN 2541-7177. Available at:

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/annidhom/article/view/102>

Yuliati, L. 2013. Efektivitas Bahan Ajar IPA Terpadu terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMP. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 9(1), hlm. 55—57. DOI: <https://doi.org/10.15294/jpfi.v9i1.2580>. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPFI/article/view/2580/2633>

Zheng, D., et al., 2015. Effects of ethical leadership on emotional exhaustion in high moral intensity situations, *The Leadership Quarterly*, Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.01.006>

Zuldafril. 2013. Pembahasan Penerapan Penelitian Postmodern Di Indonesia Didasarkan Artikel Penelitian Kritis Modern Dan Post Modern Allan Tarp Grenaa International Baccalaureate, *Jurnal Edukasi*, Vol. 11, No. 2, Desember, hlm.241. DOI: <http://dx.doi.org/10.31571/edukasi.v11i2.219>. Retrieved from <http://journal.ikipgriptk.ac.id/index.php/edukasi/article/view/219/218>

Al-Gazālī, Abū Hamīd. 1997. al-Mustasyfa min Ilm al Ushul, Vol. II, *Beirut: Mu'assasat al-Risālah*.

Al-Gazālī, Abū Hamīd. 2008. Ihya' Ulūmuddīn, juz 2, *Qairo, Mesir: Daar al-Taqwa*.

Bickmore, T. W., Fernando, R., Ring, L., & Schulman, D. 2009. Towards Empathic Touch by Relational Agents. Hungary: International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems ([www.ifaamas.org](http://www.ifaamas.org)). All rights reserved.

Disampaikan dalam FGD, “Kerjasama Pemberantasan Terorisme” oleh Menkopulhukan-BNPT-Unpad, di Bandung 30 September 2014.

Edison, E. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, *Bandung : CV. ALFABETA*.

Lickona, Thomas. 1992. Educating For Character. *USA: Bantam Books*.

Shapiro, J. & Stefkovich, J. 2010. *Ethical leadership and decision making in education*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Third Edition. the Taylor & Francis e-Library.

Subandijah. 1992 Pengembangan dan inovasi kurikulum, *PT Raja Grafindo Persada*.

Tholkhah, Imam. 2010. Ahlak Pendidikan Islam. *Jakarta: Titian Pena*.

Zizek, Slavoj. 2008. *On Violence*, London: Verso.

[http://snpk.kemenkopmk.go.id/Docs/PNPM\\_SNPk\\_2015Mar\\_GU.pdf](http://snpk.kemenkopmk.go.id/Docs/PNPM_SNPk_2015Mar_GU.pdf), diakses 10 Juli 2019, pukul 17.08

<https://www.csis.or.id/publications/asking-sensitive-questions-panduan-pelaksanaan-survei-dengan-tema-tindakan-ekstrem-berbasis-agama-dan-non-agama>, diakses 10 Juli 2019, pukul 18.22

<https://www.kontras.org/>